

## **SOB MENANTANG BUDAYA GLOBAL DAN MENGGANYANG BUDAYA LOKAL**

**Oleh: Hariyono\*)**

Sejak diberlakukannya SOB, *Staat van Oorlog en Beleg* (keadaan darurat perang) pada tanggal 14 Maret 1957<sup>i</sup> wacana kehidupan demokrasi di Indonesia langsung berubah drastis. Tatanan politik yang waktu itu didasarkan pada sistem parlementer dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. *Paspor budaya* yang sebelumnya sangat dominan --budaya demokrasi liberal yang kini sering dikaitkan dengan globalisasi-- mulai dipertanyakan. Hubungan masyarakat dan negara langsung mengalami perubahan drastis, yaitu dari negara *lembek* menjadi negara *keras*<sup>ii</sup>. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengaruh SOB terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang didominasi oleh presiden dan militer. Berhubung secara de facto Orde Baru juga menerapkan situasi darurat, selama kekuasaan Orde baru dalam tulisan ini dianggap sebagai situasi SOB juga.

### **Latar Situasi**

Jatuh banggunya kabinet di masa demokrasi parlementer lebih banyak dipengaruhi oleh pembagian kekuasaan dan perebutan kekuasaan di antara elit-elit partai-partai politik. Para elit partai politik cenderung memperjuangkan demokrasi dalam tataran wacana, sementara dalam tataran kehidupan sehari-hari pola sikap dan tindakan mereka kurang memperhatikan kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak berlebihan bila situasi tersebut menyebabkan Indonesia dikuasai oleh para oligarki<sup>iii</sup>. Mayoritas masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai budaya tradisional kurang simpati dengan elit partai politik yang cenderung berebut kekuasaan. Apalagi banyak di antara mereka yang korup. Harapan mereka akan hasil pemilu yang dapat memilih wakil yang dapat memperjuangkan aspirasinya pudar setelah tahu akan kinerja elit partai-partai politik yang sulit bekerjasama demi kepentingan rakyat. Rakyat ingin kembali pada situasi revolusi nasional, dimana

---

\*) Dosen sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

antara pemimpin dan rakyat bersatu dan merasa senasib sepenanggungan. Mereka cenderung mengidolakan pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Situasi tersebut bertemu dengan keinginan presiden Soekarno yang berusaha menerapkan demokrasi ala Indonesia, bukan demokrasi kebarat-baratan. Konsepsi Soekarno menemukan momentum pada saat kabinet koalisi PNI-Masyumi-NU yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo tidak berhasil menjalankan programnya secara maksimal. Pelbagai pergolakan daerah serta ketidakpercayaan perwira regional terhadap pemerintahan Ali, kemudiasn disusul penarikan dukungan Masyumi serta masih kuatnya pemberontakan di beberapa daerah mendorong Ali menyerahkan mandatnya pada persiden Soekarno. Sementara kekuatan politik yang berusaha mendorong diberikannya kepercayaan Moh. Hatta dan atau Sri Sultan Hamengkubuwana IX diberi kepercayaan memerintah kurang mendapat tanggapan serius dari presiden Soekarno. Pada hari itu juga Soekarno langsung mengumumkan diberlakukannya SOB di seluruh Indonesia. Terlepas dari pro kontra terhadap sah tidaknya SOB, secara faktual SOB terus berlangsung dan memaksa partai-partai politik kehilangan inisiatif.

Mereka yang sebelumnya diuntungkan dengan paspor budaya demokrasi parlementer yaitu partai-partai politik mulai terdesak oleh kekuatan ekstra parlementer. Kekuatan ekstra parlementer --presiden Soekarno dan militer (AD)-- menggunakan alasan budaya dalam mengusur sistem yang berlaku sebelumnya. Demokrasi parlementer dianggap berasal dari Barat yang liberal tidak sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa sehingga wajar kalau mengalami kegagalan. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus disesuaikan dengan kepribadian dan kebudayaan nasional.

SOB telah menjadi sarana efektif dalam menggilas kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dan dibutuhkan oleh penguasa. Pada tataran awal SOB dapat melumpuhkan wacana budaya yang dominan sebelumnya, yaitu demokrasi liberal. Ketidakbecusan elit partai-partai politik dalam menjaga konsistensi dalam mengembangkan demokrasi secara benar, adil dan arif

dijadikan alasan kegagalan demokrasi parlementer, suatu demokrasi yang berasal dari Barat. Dengan dipelopori oleh presiden Soekarno, usulan untuk memberlakukan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai budaya sendiri mendapatkan legitimasi publik. Ironisnya pada saat yang bersamaan tuntutan daerah untuk memperoleh otonomi (termasuk dalam aspek kebudayaannya) juga mendapat tantangan yang serius. Dengan alasan demi persatuan dan kesatuan bangsa tuntutan otonomi daerah --terutama dengan adanya gerakan perlawanan bersenjata PRRI/Permesta-- kurang mendapat tanggapan serius dari pemerintah pusat. Bahkan di masa Orde Baru otonomi daerah berhasil dilumpuhkan dengan sentralisasi kekuasaan yang memberlakukan UU no 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dan UU no. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa<sup>iv</sup>.

### **Realisasi SOB**

Diterapkannya SOB mempermudah presiden Soekarno menjalankan konsepnya. Upayanya mengembalikan demokrasi sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa, yang kemudian terkenal dengan sebutan demokrasi terpimpin dapat berjalan secara efisien. Partai-partai politik tidak mampu mengambil inisiatif kebijakan. Mereka menerima dengan konsepsi penyederhanaan partai daripada partai dibubarkan sebagaimana pernah diungkapkan oleh presiden Soekarno yang ingin menguburkan partai-partai politik. Soekarno setelah berhasil menyusun kabinet Juanda berhasil mengurangi pengaruh parlemen dengan terbentuknya dewan nasional. Bahkan lembaga konstituante yang berhasil dalam menyepakati pelbagai hal yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM namun kurang berhasil menyepakati dasar negara dapat dibubarkan. Dekrit presiden 5 Juli 1945 dapat berjalan secara efektif karena pada saat pengundangannya masih diberlakukan SOB. Dengan kembali berlakunya UUD 1945 kekuasaan presiden dan militer --yang memanfaatkan konsep golongan fungsional-- menjadi kuat. Presiden Soekarno menjadi kekuatan utama yang anti budaya global yang dikuasai oleh kekuatan liberalisme. Presiden Soekarno menantang budaya global dan mencari alternatif yang tidak

disandarkan pada kekuatan liberalisme dan kapitalisme. Budaya global pada saat itu cenderung diidentikkan dengan kolonialisme dan imperialisme baru.

Penguasa riil dalam SOB yaitu AD memanfaatkan tuntutan serta realisasi presiden Soekarno terhadap demokrasi terpimpin. Konsepsi presiden Soekarno dimanfaatkan secara cerdas dan maksimal oleh AD untuk menunjang kepentingan serta legitimasi yang diperolehnya<sup>v</sup>. Dengan alasan demokrasi Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka seyogyanya tuntutan menempatkan militer di luar panggung politik juga harus disisihkan. Militer Indonesia dianggap mempunyai karakteristik serta keunikan tersendiri<sup>vi</sup> yang tidak dapat disamakan dengan militer di negara-negara lain. Alasan klasik yang selalu dilontarkan adalah militer Indonesia mempunyai latar belakang sejarah dan kebudayaan yang berbeda. Sejarah TNI di masa revolusi nasional menjadi dasar legitimasi<sup>vii</sup>. Konsepsi strategis militer Indonesia tersebut dituangkan secara cerdas oleh Nasution dengan *konsep jalan tengah*.

Konsepsi Nasution tersebut sebenarnya merupakan rasionalisasi dan legitimasi dari apa yang sudah diperoleh dan masih ingin diperoleh lagi oleh militer<sup>viii</sup>. Apa yang sudah diperoleh oleh militer sebelum Nasution mengemukakan konsepsi jalan tengah adalah keterlibatannya dalam bidang politik mendapat persetujuan, yaitu dapat menempatkan wakilnya duduk dalam kabinet<sup>ix</sup>, menjadi bagian dari golongan fungsional dan duduk dalam pelbagai bidang politik termasuk Dewan Nasional<sup>x</sup> dan Depernas, memperoleh aset ekonomi dengan keberhasilan elit partai politik melakukan nasionalisasi ekonomi<sup>xi</sup> pada akhir tahun 1957.

Usaha militer mengembangkan pengaruh semakin berhasil. Pemberlakuan SOB terus diperpanjang. Baru pada tahun 1963, yaitu setelah Irian Barat berhasil direbut SOB dicabut. Selama masa diberlakukannya SOB AD dengan cerdas dan efektif menjadikan institusinya sebagai kekuatan sosial politik dan ekonomi yang dominan. Aktivitas politik --terutama di daerah-daerah-- sangat ditentukan oleh kebijakan dan selera pimpinan militer di daerah yang menggunakan jabatan Peperda (Penguasa Perang Daerah) untuk membatasi dan atau melarang pelbagai aktivitas politik. Partai politik yang potensial mengancam eksistensinya, terutama PKI

mendapat perlakuan yang keras, hingga muncul peristiwa tiga daerah selatan dan sebagainya. Pimpinan AD dengan mudah menangkap mereka yang dianggap sebagai koruptor dan lawan-lawannya yang dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional<sup>xii</sup>.

Begitu lama dan efektifnya militer berperan selama berlangsungnya SOB, keberadaan mereka sulit digoyang kekuatan politik lain --termasuk oleh presiden Soekarno. Pimpinan AD dengan cerdas berbagi kekuasaan dan rejeki serta melakukan konsolidasi serta mencari alternatif dan legitimasi dalam mengantisipasi kemungkinan dicabutnya SOB. Mereka sadar secara yuridis SOB tidak mungkin diberlakukan terus menerus, sementara privelege yang telah mereka peroleh harus dipertahankan. Kondisi itulah yang mendorong pimpinan AD mencari rasionalisasi dan legitimasi posisi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menggunakan cara yang represif melalui intimidasi dan pressure selain menciptakan wacana kultural sebagai wahana hegemonik. Melalui cara tersebut peluang terjaminnya kekuasaan militer dapat dipertahankan.

### **Institusionalisasi Peran Militer**

Proses represif yang dilakukan oleh pihak militer adalah membatasi dan atau melarang pelbagai kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik dan atau ormas. Pada saat yang bersamaan perwira militer mendirikan dan bekerjasama dengan ormas untuk mendapatkan dukungan massa melalui program BKS. BKS kemudian mengalami kegagalan karena beberapa pimpinan partai merasa dirugikan<sup>xiii</sup> dan kurang mendukung program tersebut. Ormas yang difasilitasi dan didirikan oleh pimpinan militer adalah SOKSI, MKGR dan Kosgoro apa yang dijamin Orde Baru pernah dianggap sebagai KINO utama Golkar.

Dalam tatanan ekonomi dan politik konsepsi Soekarno tentang golongan fungsional<sup>xiv</sup> dilestarikan untuk kepentingannya. Dengan mengklaim dirinya sebagai golongan fungsional militer dengan mudah dapat memasuki pelbagai institusi lain, mulai dari posisi di kabinet, Dewan nasional, Depernas, legislatif hingga masalah administrasi umum dan ekonomi. Bahkan kemudian konsepsi tersebut dilembagakan. dengan Dwi Fungsi ABRI sejak tahun 1966.

Di masa Orde baru suasana SOB tidak diterapkan secara formal, namun suasana tersebut tetap dilestarikan dengan pembentukan lembaga kopkamtib hingga bakorstranas. Konsepsi jalan tengah dikemas dan dilestarikan melalui konsepsi dwifungsi ABRI. Dari konsepsi tersebut peran militer semakin terinstitusionalisasi dan terkesan sah secara kultural dan historis. Ironisnya kekuatan asing (politik dan ekonomi) yang dipelopori oleh negara-negara maju (yang sering diidentikkan dengan negara demokratis) terkesan mendukung --selama kepentingan mereka terpenuhi. Peran militer baru mengalami penurunan seiring dengan perubahan tatanan ekonomi global pasca perang dingin dengan tuntutan neo liberalisme terhadap terciptanya pemerintahan yang efisien terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ketemu dengan tuntutan elemen sipil terhadap penguatan *civil society* dan menempatkan gerakan mahasiswa sebagai *mekanisme pelatuk* terhadap tumbangnya rezim Suharto yang otoritarian.

### **Penghancuran potensi Civil Society**

Terlegitimasinya peran AD dalam pelbagai aspek kehidupan sosial-politik sejak diberlakukannya SOB langsung mengancam eksistensi potensi *civil society*. Kemandirian masyarakat yang dengan tertatih-tatih<sup>xv</sup> berkembang selama berlangsungnya demokrasi liberal langsung mengalami kemunduran. Negara yang sebelumnya lembek berubah menjadi negara yang kuat. Sebaliknya partai-partai politik dan masyarakat kota dengan hingar-bingar politik yang sebelumnya bebas menjadi terbatas. Partai-partai politik mulai dibatasi jumlah dan kiprahnya<sup>xvi</sup>. Melalui penerapan demokrasi terpimpin peluang kebebasan yang sebelumnya dimiliki partai-partai politik telah terkendali. Partai politik yang tidak menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan mendukung demokrasi terpimpin dibubarkan.

Penghancuran budaya demokrasi liberal dikaitkan dengan tantangan pimpinan politik pada saat itu terhadap budaya global yang diwarnai oleh peran dingin. Proses menantang budaya global dilakukan dengan cerdas oleh Soekarno, sehingga dapat memainkan peran yang cukup signifikan dalam persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Keberhasilan merebut Irian Barat tidak dapat dilepaskan dari peran Soekarno yang memanfaatkan masa detente. Wacana

budaya yang dominan pada saat itu adalah ingin kembali pada suasana revolusi. Banyak masyarakat yang kecewa dengan sikap para elit politik yang cenderung berebut kekuasaan dan fasilitas negara. Mereka ingin dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kondisi ini menjadikan partai-partai politik waktu itu, terutama setelah pemilu 1955 tidak lagi mandiri dan dekat dengan rakyat.

Kekuatan sipil yang relatif mandiri hanyalah PKI<sup>xvii</sup>. Partai-partai politik lain relatif tidak mampu melakukan pemberdayaan komunitas. Kebanyakan di antara elit-elit partai politik yang ada cenderung mengeksploitasi dan memanipulasi budaya primordial yang ada di masyarakat yang menguntungkan diri dan kelompoknya. Hal tersebut kentara sejak dilaksanakannya pemilu lokal 1957 hingga beralihnya kekuasaan pada tangan Soeharto. Masyumi dan PSI yang secara ideologis --sangat mentolerir investor asing-- berseberangan dengan mainstream dominan pada saat itu merasa tidak puas. Sebagian pimpinan mereka bahkan ada yang larut pada usaha melakukan perlawanan dengan kekerasan di samping menjalin kerjasama dengan kekuatan asing<sup>xviii</sup>. Klimaks dari kejatuhan posisi Masyumi adalah dengan terbitnya kebijakan pemerintah di tahun 1960 yang membubarkan Masyumi dan PSI.

Potensi masyarakat yang mandiri di pelbagai daerah mulai dengan mudah diintervensi oleh militer baik dalam posisi sebagai aparatus represif<sup>xix</sup> maupun ideologis. Dalih demi keamanan militer leluasa menindak individu dan atau kelompok yang berseberangan dengan dirinya. SOBSI pada tanggal 18 Maret langsung bereaksi setelah peperda di Sumatra Selatan melakukan tindakan represif. Ancaman SOBSI untuk melakukan mogok nasional bila susunan kabinet yang akan dibentuk memasukkan Masyumi dan mengucilkan PKI dicawab oleh MBAD, bahwa ancaman pemogokan akan berkaitan dengan keamanan nasional. Hal tersebut justru dimanfaatkan oleh MBAD untuk mengintruksikan pada peperda melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap serikat buruh. Pemogokan di perusahaan yang dianggap vital dilarang oleh penguasa militer. Dalam tataran wacana, militer selalu mengklaim dirinya sebagai anak kandung

rakyat yang akan berbakti untuk kepentingan rakyat. Secara terus menerus militer mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penyelamat revolusi nasional<sup>xx</sup>.

Pada masa kekuasaan Soeharto, keadaan darurat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sebagaimana jabatannya sebagai Pangkopkamtib dijadikan senjata pamungkas dalam menghancurkan musuh. Kekuatan sipil yang pertama kali menjadi sasaran adalah PKI. Uniknya kekuatan politik sipil yang lain (golongan agama dan nasionalis) larut dan bangga sehingga tidak sadar menjadi objek *masifikasi*<sup>xxi</sup>. Mereka sangat antusias menghancurkan kekuatan yang terkait dengan PKI --termasuk terlibat pembunuhan massal tanpa rasa bersalah dan berdosa. Baru setelah eksistensi riil kekuatan komunis dapat dilibas, giliran kekuatan sipil lain mendapat giliran. Giliran pertama adalah kekuatan nasionalis yang dianggap pendukung Soekarno. Proses desoekarnoisasi dijalankan dengan sistematis. Mereka yang dianggap kepala batu dengan mudah dituduh PNI ASU yang dicap pro komunis. Berikutnya kekuatan sipil dari kalangan agama (Islam) yang dianggap sebagai pencerminan ekstrem kanan<sup>xxii</sup>. Sementara di kalangan kampus dan mahasiswa proses pembersihan dilakukan secara sistematis setelah peristiwa malari hingga dikeluarkannya kebijakan NKK (normalisasi kehidupan kampus) di tahun 1978.

Kehebatan rezim Orde Baru adalah membius elit dan massa yang ada untuk saling curiga dan membenci. Kekuatan sipil larut terhadap proses komunikasi yang tidak sehat. Para elit cenderung melakukan manipulasi informasi dan atau simbol, sementara massa mengalami proses distorsi komunikasi yang sistematis. Kondisi ini mempermudah pihak aparat mengawasi dan membatasi potensi kritis masyarakat, karena komunitas yang berbeda dengan mudah akan melaporkan aktivitas komunitas lainnya.

Pada masa kekuasaan Soeharto dengan rezim Orde Barunya terjadi standar ganda dalam menantang budaya global<sup>xxiii</sup>. Pada konteks budaya yang mengutamakan keterbukaan dan kebebasan dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sebaliknya terhadap berkembangnya budaya konsumtif dan sistem perekonomian yang kapitalistik dianggap sebagai sebuah tuntutan jaman. Posisi tersebut semakin represif dengan miskinnya kekuatan reflektif



dari pimpinan Orde Baru dalam memainkan peran di percaturan internasional<sup>xxiv</sup>. Rezim mereka telah terjebak pada posisi *komprador* yang pasif. Tuntutan kekuatan modal asing akan tenaga kerja yang murah dan penurut, pasar yang tidak kritis dilayani dengan penciptaan struktur kehidupan yang mengutamakan stabilitas nasional. Tiadanya kemampuan reflektif serta kepercayaan diri dari rezim Orde Baru mendorong terciptanya suatu negara yang bersifat represif dan parasit terhadap rakyatnya di satu sisi. Di sisi lain cenderung menjadi penurut terhadap tuntutan kekuatan asing (politik dan ekonomi) walaupun hal tersebut merugikan kepentingan bangsa dan negaranya. Modal sosial yang bertumpu pada kearifan kultural mengalami penghancuran. Masyarakat tercerabut dari akar budaya dan cenderung larut pada kesadaran palsu yang diciptakan oleh kapitalisme global. Barangkali konsep *One Dimentional Man* dari Herbert Marcuse masih ada relevansinya terhadap aspek budaya yang berkembang di Indonesia.

Pengganyangan terhadap budaya lokal berlangsung secara drastis. Proses kekuasaan yang sentralistik dari Orde Baru tidak mentolelir kemandirian komunitas, termasuk komunitas adat. Penyeragaman birokrasi sampai di tingkat warga -RT/PKK dan desa-- menghancurkan budaya masyarakat lokal. Para pemimpin yang mempunyai akar massa kuat cenderung diganti dengan pemimpin yang dekat dengan kekuasaan. Budaya elit yang mengabdikan pada rakyat berubah menjadi mengabdikan pada atasan. Pengganyangan tersebut berjalan secara efisien dengan masuknya penetrasi ekonomi uang dan pasar yang kurang menghargai nilai adat yang berbasis pada subsistensi.

Kepribadian dan kebudayaan nasional yang dipropagandakan oleh rezim Orde Baru cenderung bersifat manipulatif. Komunitas masyarakat yang telah lama dengan kebudayaan lokalnya justru dihancurkan demi penyeragaman institusi kekuasaan. Mereka semakin tidak berdaya menghadapi intervensi dan penetrasi budaya global kapitalis. Mereka cenderung konsumtif dan gagap dalam menghadapi perubahan budaya akibat kehilangan kearifan kultural.

### **Kegagalan Dialog**

Pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia sejak tahun 1950-an hingga kini yang sering melakukan standar ganda terhadap budaya global dan lokal mencerminkan kegagalan suatu proses dialog budaya. Konsepsi kebudayaan nasional yang oleh *the founding father's* dilakukan melalui proses dialog melalui pelbagai wacana yang penuh makna justru mengalami pendangkalan. Kebudayaan sebagai sosok yang terus menjadi dan berinteraksi tidak ditempatkan dalam konteks yang utuh dan jujur sehingga sering menimbulkan manipulasi dan atau distorsi. Ruang publik yang memungkinkan masyarakat berdialog secara terbuka dan kritis mulai berantakan dengan diterapkannya SOB. Unikny roh dari suasana SOB dilakukan oleh rezim Orde Baru tanpa menggunakan baju SOB, melainkan stabilitas nasional demi tercapainya target pembangunan. Wacana budaya sejak diberlakukannya SOB cenderung berlangsung monolog. Konsepsi presiden Soekarno telah menjadi grand narasi yang tidak boleh ditolak dan dikritik. Perastuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan. Pola pikir yang bebas dan mengkritik secara terbuka dianggap pencerminan budaya liberal yang individualistik. Kebudayaan nasional sangat diagung-agungkan pada saatitu. Kebudayaan asing yang berbeda dianggap sebagai bagian dari kekuatan imperialime dan kolonialisme baru. Di Masa Orde Baru topeng budaya nasional menjadi dominan dalam tatanan wacana, sedang dalam tataran praktis budaya global yang kapitalistik dan konsumtif lebih dominan. Budaya lokal mengalami proses marginalisasi baik dalam tataran wacana maupun praktis.

Kebudayaan lokal, nasional maupun global perlu ditempatkan pada kebutuhan komunitas pendukungnya tanpa harus meremehkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dalam konteks tersebut komunitas yang berbudaya dapat mengembangkan wacana dan kemandirian kulturalnya secara bijak. Tradisi yang telah menjadi bagian integral kebudayaan lokal maupun nasional tidak harus disikapi secara tradisional. Keberadaan komunitas dan kebudayaan lokal yang sering rentan dari intervensi kebudayaan nasional dan global --baik melalui proses represif maupun hegemonik-- memerlukan pendekatan dan sikap yang arif. Komunitas pendukung kebudayaan harus diberi

kebebasan untuk mengembangkan kebudayaannya sehingga proses kreatif yang dimiliki dapat berkembang tanpa harus merasa rendah diri dengan pola budaya lain.

Salah satu kunci keberhasilan proses dialog budaya adalah peran intelektual sebagai broker budaya. Wacana mereka yang terus berkembang kadang tanpa disadari membuat dirinya mengukur dan mengevaluasi kebudayaan di luar dirinya dari wacana yang dimiliki. Mereka yang berpikir *stricto sensu* cenderung memaksakan perspektif yang dimiliki menjadi satu-satunya kebenaran akibat hilangnya perspektif emik. Dibutuhkan suatu kemampuan reflektif agar komunitas pendukung budaya yang lebih kuat dan memiliki akses lebih besar tidak melakukan intervensi dan penetrasi yang membahayakan eksistensi budaya lokal.

Kasus di era reformasi yang unik adalah kebijakan untuk mengembangkan *civil society* tanpa dibarengi dengan pengembangan kebutuhan dan kebudayaan komunitasnya. Sebuah paradoks yang sering dilontarkan oleh pejabat dan intelektual dalam mengembangkan sebuah piranti peraturan bukan didasarkan pada kebutuhan akan pengembangan dan pemanfaatan modal sosial yang dimiliki oleh komunitas, melainkan untuk menarik datangnya investor asing. Potensi untuk membangkitkan energi sosial komunitas yang utama tentu harus dicari dalam potensi kultural komunitas yang bersangkutan, sementara investor asing hanya menjadi faktor sekunder, bukan sebaliknya. Proses dialog yang kritis dan reflektif perlu diimbangi dengan pemihakan pada komunitas yang lebih lemah tanpa harus terjebak pada manipulasi kultural, sehingga proses *civil society* berkembang sesuai dengan mainstream kultural komunitas yang bersangkutan, bukan grand narasi yang dikembangkan oleh kekuatan di luar komunitas kultural asing yang potensial mengasingkan komunitas yang bersangkutan dari kebudayaannya sendiri.

*Civil society* yang berkembang di era reformasi masih membutuhkan perjuangan dan keteladanan. Sementara elit politik yang sering bicara kepentingan rakyat sering tidak dapat menjadi teladan bagi kehidupan yang beradab. Mereka sibuk memperjuangkan fasilitas diri dan kelompoknya sehingga wajar kalau proses pembagian kekuasaan hanya mempertontonkan kerakusan dan egoisme. LSM banyak yang tersusupi oleh virus petualang, sehingga mencari

keuntungan di balik pemberdayaan masyarakat. apakah salah bila sebagian rakyat yang masih dipengaruhi budaya patrimonial mendambakan munculnya pemimpin yang kuat tanpa menyadari akan potensinya menghancurkan kebebasan komunitasnya? Pengalaman sebelum diberlakukannya SOB secara masip menunjukkan eliit politik cenderung *dikuasai oleh akal bulus daripada suatu perjuangan yang tulus*. Ketulusan hanya akan menang dalam suasana keterbukaan, kesetaraan dan kebertanggungjawaban, hingga sudah waktunya kita mendialogkan pelbagai maintream budaya yang beragam secara terbuka, setara dan bertanggungjawab secara tulus, bukan dengan akal bulus untuk mencari fulus. Ketulusan akan memberi kearifan dan meminimalisir pihak yang ingin menciptakan SOB baru di Indonesia.

---

<sup>i</sup> Sebuah kebijakan yang didasarkan pada Algemene Machtigings Ordonantie Stbl 1939 no. 557. Pada tanggal 27 Desember 1957 SOB diganti dengan UU no. 74 tahun 1957 dan ditetapkan sebagai keadaan bahaya (LNRI No. 160/1957 & TLNRI No. 1485/1957). Tanggal 16 Desember 1959 dicabut dan diganti dengan peraturan pemerintah pengganti UU No. 23 tahun 1959 dan ditetapkan keadaan bahaya (LNRI No. 139/1959)

<sup>ii</sup> Breman, J. 1981. *Rezim Baru di Asia: Negara Lembek dalam peralihan menjadi negara Kuat*. dalam *Prisma* no. 3 Tahun ke X hal. 72-92.

<sup>iii</sup> Lihat Arief Budiman, 1991, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.

<sup>iv</sup> LN RI no. 38 dan TLN RI no. 3037 tahun 1974, LNRI no. 56 dan RLNRI no. 3153 tahun 1979. Merupakan peraturan yang secara sistematis dan sistemik langsung menghancurkan potensi budaya lokal. Hal ini diperparah dengan sistem kekuasaan yang berjalan secara hegemonik dan represif di masa Orde Baru.

<sup>v</sup> Lihat monografi Daniel Lev, 1966. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. Salim Said, 1992. *Genesis of Power*, khususnya bab tentang epilogue. Singapore-Jakarta; Institute of Southeast Asian Studies and Pustaka Sinar Harapan.

<sup>vi</sup> Alasan perjuangan revolusi nasional --suatu konsep yang ingin dimanipulasi menjadi perang kemerdekaan oleh Nasution-- dijadikan alasan keterlibatan militer di luar bidang militer sebagai sesuatu yang sah dan mempunyai pijakan historis. Bila konsepsi tersebut diterima, timbul pertanyaan apakah pelajar, pemuda, golongan agama dan lain-lain yang di masa revolusi nasional terlibat dalam bidang militer untuk berjuang mempertahankan negara juga dapat mengklaim dirinya dapat memiliki dwi fungsi?

<sup>vii</sup> Konsepsi dwi fungsi selalu mengklaim keberadaan TNI yang didirikan oleh rakyat dan terlibat dalam pelbagai aspek kehidupan, terutama di masa gerilya sebagai suatu yang harus dijaga. Situasi ini dapat menimbulkan tuntutan yang sama dari elemen masyarakat lain. Apakah pelajar, pemuda, golongan agama, petani dan yang lain juga dapat menerapkan dwi fungsi, karena mereka juga ikut angkat senjata?

<sup>viii</sup> Lihat Yahya Muhaimin, 1982. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Salim Said, *Genesis...dan Crouch, Politik dan Militer di Indonesia*, 1986. Jakarta : Sinar Harapan..

<sup>ix</sup> Nasution berhasil mendeask presiden Soekarno untuk menempatkan kolo. Suprayogi sebagai menteri negara urusan stabilisasi ekonomi dan Kol.Moh. Nazir sebagai menteri pelayaran pada kabinet Juanda.

<sup>x</sup> Pada mulanya Nasution menuntut jatah separoh dari golongan fungsional berasal dari militer (Lev, 1966), namun kemudian disepakati bahwa wakil militer di Dewan Nasional hanya 35

<sup>xi</sup> . Dengan cerdas pimpinan militer mengambil alih penanganan dan pengelolaan aset ekonomi yang dinasionalisasi berada pada kekuasaannya. Sejak saat itu banyak perkebunan dan industri strategis langsung

dibawah kendali perwira militer, terutama AD dengan alasan untuk menjaga ketertiban. Rasionalisasi bagi perwira yang ditempatkan untuk mengelola aset ekonomi tersebut adalah kekaryaan.

<sup>xii</sup> Lihat penjelasan Nasution dalam biografi Nasution Memenuhi Panggilan Tugas jil. 4: Masa Pancaroba Kedua. 1984. Jakarta. Gunung Agung.

<sup>xiii</sup> Wawancara penulis dengan pak Darman tokoh PKI yang sejak tahun 1957 menjabat sekretaris partai di Maluku pada tanggal 11 Oktobwer 2000. Wawancara dengan Bapak KH.Syaid Budhari tokoh muda NU yang menjadi salah satu pendiri PMII dan anggota muda DPRS pada tanggal 27 Nov. 2000

<sup>xiv</sup> Sebuah kajian yang detail tentang konsepsi golongan fungsional dalam teori dan praktek dipaparkan oleh Reeve dalam Sukarnoism and Indonesia's Functional Group State: Part One. Developing Indonesia Democracy dalam RIMA no. 1 Vol. 13 tahun 1978 page 43-94 dan Sukarnoism and Indonesia's Funcional Group State: Part Two, Implementing Indonesia Democracy dalam Rima no. 1. vol. 13 tahun 1979. page. 53-115.

<sup>xv</sup> Salah satu sebab tidak dapat berkembangnya civil society masyarakat Indonesia adalah kuatnya budaya primordial yang telah mengakar (Alfian, 198..) dan diperparah oleh sikap dan tindakan sebagian besar elit politik --yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan sosial mengembangkan civil society-- yang korup dan cenderung mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya. Kondisi ini menimbulkan sistem politik oligarki (Budiman, 1991).

<sup>xvi</sup> Pembatasan terhadap kebebasan pers dilakukan oleh militer sebagaimana diakui oleh Nasution dalam Mengabdikan Republik jil.4 dan diulas dengan kritis oleh Rangkuti 1992. Wartawan dengan Aneka Citra dalam Said (peny.). H. Rosihan Anwar Wartawan dengan Aneka Citra. Sedangkan mengenai pembatasan dan penyederhanaan parpol diatur oleh ....

<sup>xvii</sup> Sartono Kartodirdjo menganggap keberhasilan PKI dalam menggalang dukungan adalah proses kepemimpinan lokal yang benar-benar membumi, Lihat dalam trulisannya *Peasant Mobilization and Political Development in Indonesia*. 1975. Yogyakarta. Institute of Rural and Regional Studies. Uraian yang detail tentang kiprah PKI di bawah Aidit salah satunya dikupas oleh Antonie C.A. Dake. 1973. *In Tje Spirit of the Red Banteng, Indonesian Communists between Moscow and Peking*. Mouton & Co. Paris. Menurut Dake kecakapan dan keluwesan Aidit Cs dalam menerapkan taktik menjadi kunci utama.

<sup>xviii</sup> Suatu telaah tentang keterlibatan asing yang dipimpin CIA dijelaskan secara baik oleh Kahin & Kahin. 1997. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri* Terj. Leirissa. Jakarta. Grafiti. Buku K. Conboy & J. Morrison. 1999, *Feet to the fire, Cia Covert Operations in Indonesia, 1957-1958* Annapolis. naval Insititute Press. Bunnel, F.P. The Central Intelligence Agency Deputy Directoate fo Plans 1961 Secret Memorandum on Indonesia: A Study in the Politics of Policy Formulation in the Kennedy Administration, in *Indonesia 1976* no. 22. Pp.131-169.

<sup>xix</sup> Awal penerapan SOB militer (AD) langsung menangkapi beberapa politisi yang diduga korup. Mereka yang ditangkap a.l. Iskag Tjokroadisurjo, Dr. Ong Eng Die, Dr. A.K. Gani, Sardju Ismunandar, Jusuf Wibisono, Zainal Arifin, Dr. Saroso, K.H. A. Dahlan dan lain-lain. Lihat Soebagijo, I.N. 1980. *Jusuf Wibisono, Karang di Tengah Gelombang*. Jakarta: Gunung Agung. hal. 208. Di Tahun 1960 militer langsung menangkapi tokoh-tokoh PKI yang mengkritik kebijakan militer Lihat Nasution *Mengabdikan Republik jild. 4*. Di tahun 1962, tepatnya tanggal 16 Januari 1962 pimpinan Masyumi dan PSI ditangkapi dan dipenjarakan di RTM Madiun. Mereka adalah Sjahrir, Soebadio S. M. Roem, Prawoto M., Yunan N. K. Isa Amshary, di samping Anak Agung Gd Agung dan Sultan Hamid. Lihat. Rosihan Anwar. 1995. *Soebadio Sastrosatomo, Pengembalian Misi Politik*. Jakarta: Grafiti, hal. 188-189.

<sup>xx</sup> Tentang klaim militer sebagai satu-satunya penyelamat Revolusi Nasional dapat dilacak dari tulisan Nasution di *Memenuhi Panggilan Tugas jil. 2: Kenangan Masa gerilya*. 1983. Jakarta: Gunung Agung. Menurut Nasution ada tiga peristiwa utama yang menjadikan militer sebagai 'penyelamat republik', yaitu dalam menghadapi serangan agresi Belanda II, Pergolakan Daerah 1957-1958 dan G-30S/PKI. Lihat Nasution. 1972. *Kekerjaan ABRI*. hal 18. Sanggahan yang cukup baik dikemukakan oleh Manai Sophian tentang peran militer di masa Agresi Belanda 2 ada dalam otobiografinya *Apa yang Masih Teringat*. Jakarta: 1991. Yayasan mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

---

<sup>xxi</sup> Suatu proses yang melibatkan pihak lain dalam proses sejarah, namun demikian momentum sejarah berhasil direbut, kelompok tersebut dipinggirkan dan dikendalikan.

<sup>xxii</sup> Di Jawa Tengah dan Jawa Timur golongan agama ikut berperan aktif dalam proses pembunuhan orang-orang yang dianggap PKI, di Bali golongan Hindu ikut terlibat, di Sumatra golongan Katolik. Uniknya kekuatan sipil masih belum dapat belajar dari sejarah, hingga kasus represif yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan mesin politik militer di Tanjung Priuk dan Lampung cenderung diperjuangkan oleh golongan Islam. Sementara perjuangan terhadap penuntasan kasus 27 Juli dilakukan oleh kelompok non agama. Komunitas sipil yang ada belum menunjukkan tanda-tanda bersinergi dalam memperjuangkan proses represif dan marginalisasi kekuatan rezim Soeharto di masa lalu.

<sup>xxiii</sup> Menurut Bur Rasuanto dasar legitimasi rezim Sukarno lebih rasional dibanding Soeharto. Lihat Bur Rasuanto dalam Wacana Vol. 2 No. 1 tahun. 200 hal. 102-118.

<sup>xxiv</sup> Salah satu contoh yang ironis adalah pencaplokan Timor Timur yang didukung kekuatan liberal kapitalis (USA) dengan alasan bangkitnya kekuatan komunis di Timor Timur, namun pasca tahun 1990an langsung mendapat kecaman dan cemooh dari kekuatan liberal-kapitalis dengan menggunakan isu HAM dan demokrasi. Suatu nasib yang sangat tragis bagi militer RI, khususnya AD.